

No	Jabatan	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun-2025	Target Keuangan				Realisasi Keuangan				Target Kinerja				Realisasi Kinerja				
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
3	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Termonitoringnya ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Subdistributor di 13 Kab/Kota	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok ditingkat distributor dan subdistributor di 13 Kab/Kota	Laporan	4				18.270.000					1	1	1	1					
		Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota	Kegiatan	1				17.486.000									1				
		Termonitoringnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	Laporan	4			408.450							1	1	1	1				
		Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13 Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13 Kab/Kota	Kegiatan	1			19.910.000										1				
		Meningkatnya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota yang ditindak lanjut	%	100	295.697.000	286.449.830	264.179.620	205.806.908	105.050.500	0	0	4	25	25	25	25	25	25	25		
		Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Sub Keg. Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dokumen	1			13.240.650										1				
		Terpantaunya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	Laporan	4	15.210.000	15.210.000	25.935.000	15.210.000					1	1	1	1					
		Terpenuhiya Kebutuhan Barang Pokok Murah dalam rangka Stabilisasi Harga	Sub Keg. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Berbagi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Pokok	Kegiatan	9	303.487.050	280.487.000	247.274.180	248.969.620	205.806.908	105.050.500			3	2	2	2	2	2	2		
		Meningkatnya pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi	Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengawasan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjasama	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	%	90	0	0	35.032.500	0	0	0	0	0	0	25	25	20	20	18,49			
		Tersusunnya laporan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Laporan	1			329.000										1				
		Terkoordinasinya Penyaluran pupuk bersubsidi		Jumlah Laporan kegiatan koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi	Laporan	5			34.703.500							1	1	1	2	1	1		
		Meningkatnya omset pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan pemasaran produk dalam negeri	Prog. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan pemasaran produk dalam negeri	%	10	0	0	0	124.833.300	0	0	0	0					10				
		Meningkatnya keikutsertaan pelaku usaha pada kegiatan pameran produk dalam negeri	Keg. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran produk dalam negeri	% Keikutsertaan	10	0	0	0	52.267.600	0	0	0	0					10				
		Terfasilitasinya UMKM dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	Sub Keg. Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	UMKM	3			52.185.000										3				
		Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	1			82.600										1				
		Meningkatnya omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	% Kenaikan Omzet	10	0	0	0	53.130.900	0	0	0	0					10				
		Terfasilitasinya UMKM dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	Sub Keg. Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	UMKM	40			52.762.000										40				
Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	1			368.900										1						
Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya penggunaan produk dalam negeri	Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase masyarakat yang paham pentingnya penggunaan produk dalam negeri	%	10	0	0	0	19.434.800	0	0	0	0					10						
Tersosialisasinya kepada masyarakat dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sub Keg. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	orang	35			19.434.800										35						
4	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Prog. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan Luar Negeri	%	100	0	78.092.000	29.110.000	2.700.000	0	22.585.980	0	0	25	25	25	25	25	25			
		Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sesuai ketentuan yang berlaku	Keg. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	%	100	0	78.092.000	29.110.000	2.700.000	0	22.585.980	0	0	25	25	25	25	25	25			
		Terfasilitasinya Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang terlayani	%	100	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25			
		Tersosialisasinya informasi terkait ekspor melalui Media Sosial dan Podcast Klinik Ekspor Sulteng		Jumlah masyarakat yang tersosialisasi terkait prosedur ekspor, Perjanjian perdagangan Internasional dan pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA)	Orang	100			2.700.000						100	100	100	100	>100	>100			
		Tersusunnya strategi akselerasi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah		Jumlah Laporan koordinasi strategi akselerasi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah	Laporan	1			29.110.000									1					
		Terfasilitasinya Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng		Persentase Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	%	100		37.690.000					Sementara		100	100	100	100	100	100			
		Tersosialisasinya Layanan Klinik Ekspor Sulteng bagi Mahasiswa sebagai upaya memebahkan ekosistem bisnis ekspor		Jumlah mahasiswa tersosialisasi	Orang	50		40.402.000					22.585.980		50					70			
		Terwujudnya Pengembangan Ekspor	Prog. Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	Juta USD	26478.59	0	156.184.000	58.220.000	5.400.000	0	45.171.960	0	0	6.619.65	6.619.65	6.619.65	6.619.65	5.096.11	3580.99			
Meningkatnya Promosi bagi Produk Ekspor Unggulan Daerah	Keg. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi	%	100	0	156.184.000	58.220.000	5.400.000	0	45.171.960	0	0	25	25	25	25		8					

No	Jabatan	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun-2025	Target Keuangan				Realisasi Keuangan				Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Sub Keg. Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha produk yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Pelaku Usaha	6	0	78.092.000	29.110.000	2.700.000	0	22.585.980	0	0			6					
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Sub Keg. Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	30		0							3	27				3		
		Terevaluasinya Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal		Jumlah Laporan evaluasi Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	Laporan	3	0	0	29.110.000	2.700.000	0	0	0	0	1	1	1			3		
		Teridentifikasinya Kualitas Kopi Sulawesi Tengah	Sub Keg. Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Kopi Sulawesi Tengah yang mengikuti identifikasi kualitas kopi	Pelaku Usaha	40	0	78.092.000	0	0	0	22.585.980	0	0								
		Terlaksananya FGD Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Export		Jumlah Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor yang mengikuti FGD	Pelaku Usaha	40										20	20					
5	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	Meningkatnya Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPPI)	Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPPI) (%)	%	100	0	0	0	0	0	0	0	0			100					
		Meningkatnya Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPPI	Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPPI (%)	%	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100				
		Tersusunnya dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPPI) Sulawesi Tengah	Sub Keg. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPPI) yang tersusun	Dokumen	1												1				
		Terfasilitasinya penyusunan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota.	Sub Keg. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota yang terfasilitasi	Laporan	1												1				
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan RPPI	Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Evaluasi Pelaksanaan RPPI yang berkualitas (%)	%	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100				
		Tersedianya data fasilitas Bina Pelaku Industri	Sub Keg. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Laporan fasilitas Bina Pelaku Industri (Laporan)	Laporan	1												1				
		Terevaluasinya sasaran rencana pembangunan industri	Sub Keg. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Laporan Evaluasi sasaran rencana pembangunan industri (Laporan)	Laporan	2																
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Industri	Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Industri (%)	%	100	0	74.214.500	33.891.000	0	0	0	0	0	0			100				
		Meningkatnya Ketersediaan Bahan Baku Industri	Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Ketersediaan Bahan Baku Industri (%)	%	100	0	9.625.000	0	0	0	0	0	0	0			100				
		Tersedianya Data Potensi Bahan Baku Industri	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Data Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia (Laporan)	Laporan	1		9.625.000								1		1				
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Industri	Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Industri (%)	%	100	0	64.589.500	33.891.000	0	0	0	0	0	0			100				
		Terlatihnya Tenaga Kerja Industri	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih (orang)	orang	20		15.603.500								20						
		Terfasilitasinya HAKI	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Sertifikat HAKI yang Terasilitasi	Sertifikat	75		48.986.000	33.891.000									79				
		Meningkatnya Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (%)	%	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0			95				
		Tersosialisasinya Kebijakan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah sosialisasi terkait Kebijakan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (sosialisasi)	Sosialisasi	1												1				
		Terevaluasinya capaian realisasi P3DN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah laporan capaian realisasi P3DN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang terevaluasi (Laporan)	Laporan	1												1				
		Meningkatnya Kualitas Daya Saing Pelaku Usaha Industri	Prog. Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri yang berkualitas (%)	%	75	0	105.134.000	28.777.250	0	0	8.180.000	0	0				75				
		Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	Keg. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kawasan Provinsi	Persentase izin usaha Industri yang terawasi dan terkendali (%)	%	75		105.134.000	28.777.250	0	0	8.180.000	0	0				75				
		Terawasinya Perizinan Berusaha sektor perindustrian	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terawasi	Dokumen	100%	0	52.973.000	0	0	0	8.180.000	0	0				100				
		Terkendalnya Perizinan Berusaha sektor perindustrian	Sub Keg. Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Assessment (OSS-RBA)	Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terkendali	Dokumen	100%	0	52.161.000	28.777.250	0	0	0	0	0				100				
Meningkatnya Daya Saing Pelaku Usaha Industri	Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri (%)	%	100	50.819.550	506.736.034	2.084.140.317	17.076.500	48.776.941	0	0	0				100						
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelaku Usaha Industri	Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Kuantitas dan Kualitas Pelaku Usaha Industri (%)	%	100	50.819.550	506.736.034	2.084.140.317	17.076.500	48.776.941	0	0	0				100						
Terlaksananya koordinasi terkait perkembangan perwilayahan, kawasan industri	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah koordinasi terkait perwilayahan, kawasan industri	Kegiatan	1			9.610.000								1							
Terpenuhi penerapan standarisasi pelaku industri	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku industri yang memenuhi standarisasi	Pelaku Industri	50			16.608.050	17.076.500						25	25							
Terbinanya Pelaku usaha industri	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku usaha industri yang terbinanya	Pelaku Usaha Industri	260	50.819.550	190.005.700	205.405.600		48.776.941				50	120	90							
Terfasilitasinya Pelaku usaha industri		Jumlah pelaku usaha industri yang terfasilitasi	Pelaku usaha industri	130			40.000.000	278.715.000						20	110							
Terbinanya Sentra Industri		Jumlah sentra yang terbinanya	Sentra IKM	5			276.730.334	1.573.801.667						2	5							

No	Jabatan	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun-2025	Target Keuangan				Realisasi Keuangan				Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
				2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Indeks	88,31												88,31				
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	11.790.000	11.790.000	11.790.000	11.886.800	0	11.483.209			3	3	3	3				
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	337.500	337.500	337.500	337.500	0	363.500						1				
		Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan (SP, MP, dan laporan SKM)		Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun	Dokumen	1												1				
		Terukurnya SKM pada layanan Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM	Layanan	1												1				
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	80	5.000.000	16.090.000	23.155.000	4.356.900	0	21.090.000	0	0	20	20	20	20				
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	5.000.000	11.500.000	6.000.000	4.356.900	0	16.500.000			1	1	1	1				
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	0	4.590.000	2.150.000	0	0	4.590.000			3	3	3	4				
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	15.005.000	0	0	0						1				
		Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen	Prog. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelayanan penyelesaian pengaduan konsumen yang difasilitasi	%	100	0	825.972.500	72.949.700	16.747.350	0	802.109.000	0	0				100				
		Meningkatnya fasilitas perlindungan konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Keg. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	100	0	825.972.500	72.949.700	16.747.350	0	802.109.000	0	0				100				
		Terfasilitasinya pengusulan BPSK di Kab Banggai	Sub Keg. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah usulan BPSK di Kab Banggai yang terfasilitasi	BPSK	1			36.142.200									1			1	
		Tersosialisasinya eksistensi BPSK dan prosedur pengaduan konsumen		Jumlah kegiatan sosialisasi terkait eksistensi BPSK dan prosedur pengaduan konsumen	Kegiatan	3		2.109.000	20.147.500	15.037.350		2.109.000						1			1	
		Terlaksananya Survei IKK (Indeks Keberdayaan Konsumen)		Jumlah responden yang mengisi kuisioner	Orang	100	0								25	25	25	25	25	29		
		Terfasilitasinya BPSK Kab Kota		Jumlah BPSK Kab Kota yang terfasilitasi	BPSK	4		800.000.000				800.000.000						4			4	
		Tersosialisasinya LPKSM di daerah Kabupaten Parigi Moutong	Sub Keg. Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah masyarakat tersosialisasi terkait kinerja LPKSM	Orang	20		23.863.500														
		Terfasilitasinya aduan konsumen	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah aduan konsumen yang difasilitasi	Aduan	43	0								10	10	10	13	10			
		Terverifikasi dan terevaluasinya kinerja BPSK secara berkala		Jumlah laporan verifikasi dan evaluasi kinerja BPSK	Laporan	4			16.660.000	1.710.000								2	2			
		Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Keg. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	80												80				
		Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar sesuai parameter ketentuan Perlindungan Konsumen	Sub Keg. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah laporan pengawasan barang beredar yang sesuai ketentuan Perlindungan Konsumen	Laporan	2												1	1			
		Terlaksananya Pengawasan Jasa sesuai parameter ketentuan Perlindungan Konsumen		Jumlah laporan pengawasan Jasa yang sesuai ketentuan Perlindungan Konsumen	Laporan	1													1			
		Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Tertib Niaga		Jumlah laporan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Tertib Niaga	Laporan	1													1			
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pengawas Perdagangan		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis bidang pengawasan	Orang	4									1	1	1	1				
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar		Jumlah kegiatan sosialisasi/edukasi pengawasan barang beredar	kegiatan	1													1			
		Terlaksananya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Sub Keg. Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus Yang ditangani	Kasus	8									2	2	2	2				

Palu,

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah

RICHARD ARNALDO, SE, M.SA
Pembina Utama Madya
NIP. 19821123 200604 1006

